

DERAP NUSANTARA

SELASA KLIVON, 6 AGUSTUS 2024 (30 SURTA 1958) |

HALAMAN 8



ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc

TRADISI SEPAK BOLA API DI JEPARA: Peserta bermain sepak bola api di Desa Kawak, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (25/6/2024). Tradisi bermain sepak bola yang digelar setahun sekali saat prosesi sedekah bumi itu sebagai simbol memerangi hawa nafsu, amarah dan hal-hal tercela sekaligus untuk menjalin kebersamaan antar warga.

Kemenkop UKM Genjot Digitalisasi UMKM Sektor Produksi

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) berupaya meningkatkan jumlah UMKM produsen yang memanfaatkan platform digital, mengingat saat ini sebagian besar UMKM yang sudah masuk ke pasar digital masih berfokus pada kegiatan reseller.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital tahun ini.

Sampai dengan Desember 2023, sekitar 25 juta pelaku UMKM atau sebesar 39,52 persen dari total UMKM sudah hadir pada platform e-Commerce, atau setara 84,3 persen dari target.

Kemenkop UKM berharap jumlah UMKM produsen dapat terus bertambah, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan digitalisasi, UMKM berpeluang besar untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi produknya sehingga dapat berkompetisi di platform digital. "Kami ingin ekonomi digital melahirkan UMKM di sektor produktif dan sektor riil, karena ini yang bisa menciptakan sumber ekonomi baru," kata Fiki pula.

Menurut Fiki, potensi ekonomi digital sebesar Rp877 triliun harus dapat dinikmati oleh UMKM. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk yang dijual di platform e-Commerce untuk memastikan bahwa mereka memberikan ruang yang lebih besar bagi produk-produk lokal. "Ini menjadi catatan kamu bahwa ekonomi digital ini manfaatnya diterima oleh siapa. Jadi keberpihakan di platform e-Commerce

ini dibutuhkan sehingga regulasi perlu diperkuat," ujar Fiki.

Selain mengoptimalkan pasar digital yang begitu besar, Fiki juga menyatakan strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk bisa memiliki daya saing yang tinggi, yaitu dengan melakukan agregasi dengan UMKM lainnya agar skala ekonominya bisa lebih besar.

Kemudian, UMKM juga perlu bermitra dengan pelaku usaha besar agar bisa memenuhi standarisasi dalam memproduksi. "Ada beberapa pendekatan yang sudah kami lakukan melalui inisiatif inkubator, enabler, agregator, dan akselerator. Dengan mengoptimalkan peran mereka, maka produk UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi," kata Fiki pula.

Dewi Tenty Septi Artianty, pegiat koperasi dan UMKM, membenarkan bahwa saat ini makin banyak UMKM yang beralih dari jualan offline ke online. Menurut dia, ini menjadi peluang sekaligus tantangan agar ke depan tren perdagangan digital tetap dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas produk.

Dia berharap agar pemerintah dapat menjembatani proses transformasi bisnis UMKM agar lebih berkembang di era teknologi digital dengan menyediakan rumah digital, sebagaimana Kemenkop UKM menyiapkan rumah produksi bersama. Hal ini diperlukan agar pelaku UMKM bisa meningkatkan SDM dan produknya melalui rumah digital tersebut. "Jadi perlu lebih diperbanyak lagi keberadaan rumah produksi yang sudah mendukung dengan ekosistem digital, terutama bagaimana membuat produk UMKM lebih cantik dan bisa diterima di berbagai pasar," kata Dewi pula. (ANTARA)

PUPR Sebut 14 Rumah Menteri Siap untuk Sidang Kabinet Perdana di IKN

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap untuk dimanfaatkan oleh para menteri yang menghadiri sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Sebanyak 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap untuk dimanfaatkan," ujar Basuki di Jakarta, Jumat.

Dia juga mengatakan bahwa terkait penempatan dan pengaturan rumah jabatan tersebut bagi para menteri akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara. "Nanti yang mengatur Bapak Menteri Sekretariat Negara, siapa ditempatkan di mana," kata Basuki.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo akan mengadakan sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan sebanyak 14 unit rumah menteri dari total 36 unit sudah siap furnished. Rumah tapak jabatan menteri berlokasi di area Persil 105, meliputi kavling 1 hingga 10, yang dilapori PUPR rampung 99,75 - 100 persen.

Sejumlah 36 unit rumah menteri ini terdiri atas bangunan di downslope sebanyak 11 unit dan bangunan upslope sebanyak 25 unit di atas lahan seluas 20,4 hektare. Sebanyak 14 unit rumah menteri yang telah terisi perabot, di antaranya



ANTARA/Andi Firdaus

Pekerja pembersih ruangan melintasi salah satu rumah menteri di kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Jalan Sumbu Barat, IKN, Kalimantan Timur.

akan ditempati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perabotan tersebut berupa kursi dan meja di ruang makan, kerja dan ruang tamu, dipan dan kasur, lemari pakaian, hingga perangkap-napal. Seluruh perabotan merupakan produksi dalam negeri," katanya. Rumah Tapak Jabatan

Menteri (RTJM) berlokasi di Jalan Sumbu Barat berjarak sekitar 1 kilometer dari Istana Negara IKN.

Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga telah ditunjang prasarana fungsional, yaitu jalan kawasan di persil 105, persil 105, pedestrian persil 105. Fasilitas pendukung fungsional yaitu pool sampah hijau rumah genset. (ANTARA)

Renovasi Stadion Mini untuk PON 2024 Memasuki Tahap Penyelesaian

MEDAN - Renovasi Stadion Mini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi arena sepak bola putri pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 memasuki tahap penyelesaian akhir.

"Kondisi kesiapan arena mungkin sudah sekitar 80 persen. Untuk lapangan hanya menunggu tiang gawang dan garis lapangan dengan panjang 105 meter dan lebar 68 meter," ujar Ketua Panitia Inti Cabang Olahraga Sepak Bola Putri PON 2024 Hadi Khairul Azhar Sinaga, di Medan, Sabtu.

Hadi menyebut progres renovasi stadion itu harus rampung akhir Agustus 2024, karena cabang sepak bola putri rencananya akan digelar sejak 5 September 2024. "Paling tidak satu pekan sebelum pertandingan harus sudah se-

lesai semua. Untuk pembangunan tribun penonton termasuk beberapa ruangan dalam penyelesaian akhir," kata dia.

Dari segi fasilitas dan kondisi, dia menjelaskan bahwa stadion yang akan digunakan sebagai arena PON 2024 tersebut memiliki standar Asian Football Confederation (AFC) atau sesuai dengan arahan oleh PSSI dan PB PON. "Lapangan dan tribun sudah memenuhi standar, cuma kami masih ada kebutuhan untuk ruangan yang dibutuhkan," sebut dia.

Selain itu, berdasarkan pemantauan, lanjut dia, kondisi rumput stadion diakui masih belum tumbuh menyeluruh dengan rimbun. Namun, dia meyakini, di sisa waktu yang ada rumput lapangan tersebut bisa tumbuh secara maksimal dengan mengencangkan tahap per-

watan yang dilakukan selama ini. "Rumput dalam waktu setengah bulan ini bisa terkejar, karena kondisinya sudah 80 persen juga," jelas dia.

Dirinya berharap dengan kerja keras seluruh pihak penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut khususnya di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik dan sukses. "Kami akan maksimal sebagai tuan rumah PON harus maksimal dan selesaikan semua," ujar dia.

PON 2024 Aceh-Sumut yang berlangsung pada 8-20 September 2024 ini mempertandingkan pertandingan 67 cabang olahraga. Provinsi Sumatera Utara akan mempertandingkan 34 cabang olahraga termasuk cabang olahraga sepak bola putri. (ANTARA)

ANTARA

Pencapaian baru ganda putri Ana/Tiwi

Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi menjuarai Australia Open 2024 pada laga final yang digelar Minggu (16/6). Kemenangan itu menjadi gelar perdana Ana/Tiwi pada ajang BWF level super 500.



Febriana Dwipuji Kusuma
Jember, 20 Februari 2001



Amalia Cahaya Pratiwi
Sukoharjo, 14 Oktober 2001

Profil

Sathio Group AUSTRALIAN BADMINTON OPEN Sydney 2024

Peringkat BWF

18

"Senang bisa mendapatkan gelar juara di level super 500 untuk kali pertama. Keberhasilan ini menambah kepercayaan diri ke depannya."

"Kemenangan ini saya persembahkan kepada pelatih, keluarga, teman-teman terdekat dan semuanya yang percaya kami mampu dan bisa."

Perjalanan meraih juara

Perempat final (14/6)		
Febriana Dwipuji Kusuma/ Amalia Cahaya Pratiwi	VS	Kaitlyn Ea/ Gronya Somerville
21-15, 21-13		
Semifinal (15/6)		
Febriana Dwipuji Kusuma/ Amalia Cahaya Pratiwi	VS	Setyana Mapasa/ Angela Yu
21-13, 21-7		
Final (16/6)		
Febriana Dwipuji Kusuma/ Amalia Cahaya Pratiwi	VS	Lai Pei Jing/ Lim Chiew Sien
12-21, 21-7, 21-13		

Upaya PBSI persiapan atlet

Menggelar pelatihan sebelum pertandingan.

Menjaga mental dan pola pikiran atlet.

Menetapkan strategi dan pola bermain sesuai dengan lawan yang dihadapi.

PBSI: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia

Fakta menarik Ana/Tiwi

Pertama kalinya bertemu pasangan Malaysia Lai/Lim.

Sebelumnya menjadi runner up Spain Masters dan Thailand Open tahun ini.

Merupakan ganda putri pertama yang menjuarai Australia Open setelah Aprilisa Putri Lejarsar Variella/Vita Marissa pada 2013.

ARTIKEL

Strategi Pengelolaan Tambang Pasca Terbitnya WIUPK untuk Ormas

Oleh Lucky Akbar*)

JAKARTA - Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang mineral. Industri pertambangan tengah menghadapi krisis legitimasi yang serius dan sering kali ditentang oleh masyarakat akibat dampak destruktif yang dihasilkannya. Banyak komunitas di sekitar area pertambangan merasakan dampak negatif operasi tambang yang dilakukan, mulai dari gangguan kesehatan, ketidakadilan sosial, hingga kerusakan lingkungan yang signifikan.

Sementara itu, keuntungan besar dari industri ini cenderung hanya dinikmati oleh sebagian kecil individu atau kelompok elit tertentu saja, serta meninggalkan berbagai persoalan di masyarakat luas untuk menanggung beban kerugian yang terjadi, termasuk di dalamnya kerusakan ekosistem yang berdampak sistemik.

Berdasarkan polemik dari kompleksitas permasalahan pertambangan tersebut pada tahun ini Pemerintah membuka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) bidang keagamaan.

Pemberian izin khusus bagi Ormas ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) telah menjadi topik yang kontroversial dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, sementara yang lain menentangnya karena potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan mengacu pada upaya untuk mengembangkan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi masyarakat luas. Dalam konteks pemberian izin tambang kepada Ormas, teori partisipasi masyarakat (community participation) menjadi relevan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat serta memperkuat kedaulatan ekonomi negara.

Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development) juga penting dalam konteks ini. Pengelolaan tambang oleh Ormas harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Beberapa penelitian telah mengungkapkan potensi positif dan negatif dari pemberian izin tambang kepada Ormas dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sebuah studi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa partisipasi Ormas dalam pengelolaan tambang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Namun, riset juga menunjukkan bahwa pemberian izin tambang kepada Ormas juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Misalnya, penelitian oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan bahwa pengelolaan tambang oleh Ormas sering kali tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dengan baik, sehingga dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat dan merusak lingkungan.

Pasca Terbitnya WIUPK

Alasan pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang itu ormas keagamaan bisa mempunyai sumber penghasilan baru untuk membiayai program-program organisasinya, juga kurang bisa diterima publik. Ormas bukanlah lembaga profit yang harus punya sumber penghasilan

raksasa untuk membiayai kegiatan mereka. Apalagi kalau mesti mengeruk pendapatan dari bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka.

Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan. Hampir tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, ormas keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka ialah untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi, para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut.

Dalam rangka menetralkan isu negatif tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan ormas. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan perusahaan kepada organisasi publik mengenai praktik penambangan yang bertanggung jawab, teknik penambangan yang aman, dan pengelolaan lingkungan.

Kemudian melakukan kerja sama dengan para ahli, yang dalam hal ini melibatkan ahli geologi, insinyur pertambangan, dan ahli lingkungan dalam perencanaan dan pengoperasian tambang. Serta bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk memperoleh dukungan teknis dan ilmiah mengenai tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.

Pemerintah dan ormas juga perlu melaksanakan pengawasan dan pengaturan secara ketat dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari pemerintah dan independen untuk memantau aktivitas pertambangan. Sanksi yang jelas dan tegas juga harus diterapkan terhadap ormas yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi standar lingkungan dan keselamatan bagi masyarakat yang terdampak.

Penting bagi ormas untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui, antara lain, sistem pelaporan yang transparan mengenai pendapatan, penggunaan dana, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan untuk memastikan bahwa hasil penambangan digunakan untuk kepentingan masyarakat antara lain dikembalikan dalam bentuk penambahan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hal penting lain yang perlu dilakukan adalah melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan operasi pertambangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta memberikan kesempatan kerja dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan komunitas kami.

Serta memberikan akses kepada berbagai entitas dalam dan luar negeri yang terkait untuk ikut melakukan monitoring dan pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas berbagai implikasi yang ditimbulkan dari seluruh aspek mulai ekonomi, lingkungan, hukum, dan sosial kemasyarakatan.

Kesimpulan

Pemberian izin tambang kepada Ormas di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan jika dilakukan dengan baik. Penting bagi pemerintah dan Ormas untuk memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik dalam mengelola tambang.

Diperlukan kerja sama antara pemerintah, Ormas, dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengawasi dan mengontrol aktivitas tambang Ormas secara ketat untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Dengan pendekatan yang tepat, pemberian izin tambang kepada Ormas dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia.***
*) Lucky Akbar adalah ASN di Kementerian Keuangan.